

“Agenda Pembangunan Lokal dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Sidoarjo”

Oleh:

Achmad Shobich

Dosen Pembimbing: **Dr. Totok Wahyu Abadi., M.Si**

Dosen Penguji 1: **Kukuh Sinduwiatmo., M.Si**

Dosen Penguji 2: **Ainur Rochmaniah., M.Si**

Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
2 Juni 2025



Pendahuluan

Pembangunan lokal di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sidoarjo, merupakan upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi aktif dan pemanfaatan potensi lokal. Meskipun kebijakan desentralisasi memberikan otonomi lebih kepada pemerintah daerah, tantangan seperti kesenjangan kapasitas dan ketimpangan pembangunan antar wilayah masih menjadi hambatan. Dalam konteks ini, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berperan penting dalam mendukung transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengambilan keputusan yang responsif.

Namun, kendala utama dalam pengembangan SIPD dan website BAPPEDA seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ahli di bidang teknologi, anggaran terbatas, serta gangguan teknis. Faktor-faktor ini perlu diatasi agar sistem informasi dapat berfungsi optimal dalam mendukung pembangunan daerah.

Teori Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan Teori Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), yang dikembangkan oleh Venkatesh et al. (2003) untuk menganalisis penerimaan dan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pembangunan lokal di Kabupaten Sidoarjo.

1. Ekspetasi Kinerja
2. Faktor Sosial
3. Ekspetasi Usaha
4. Kondisi yang Memfasilitasi

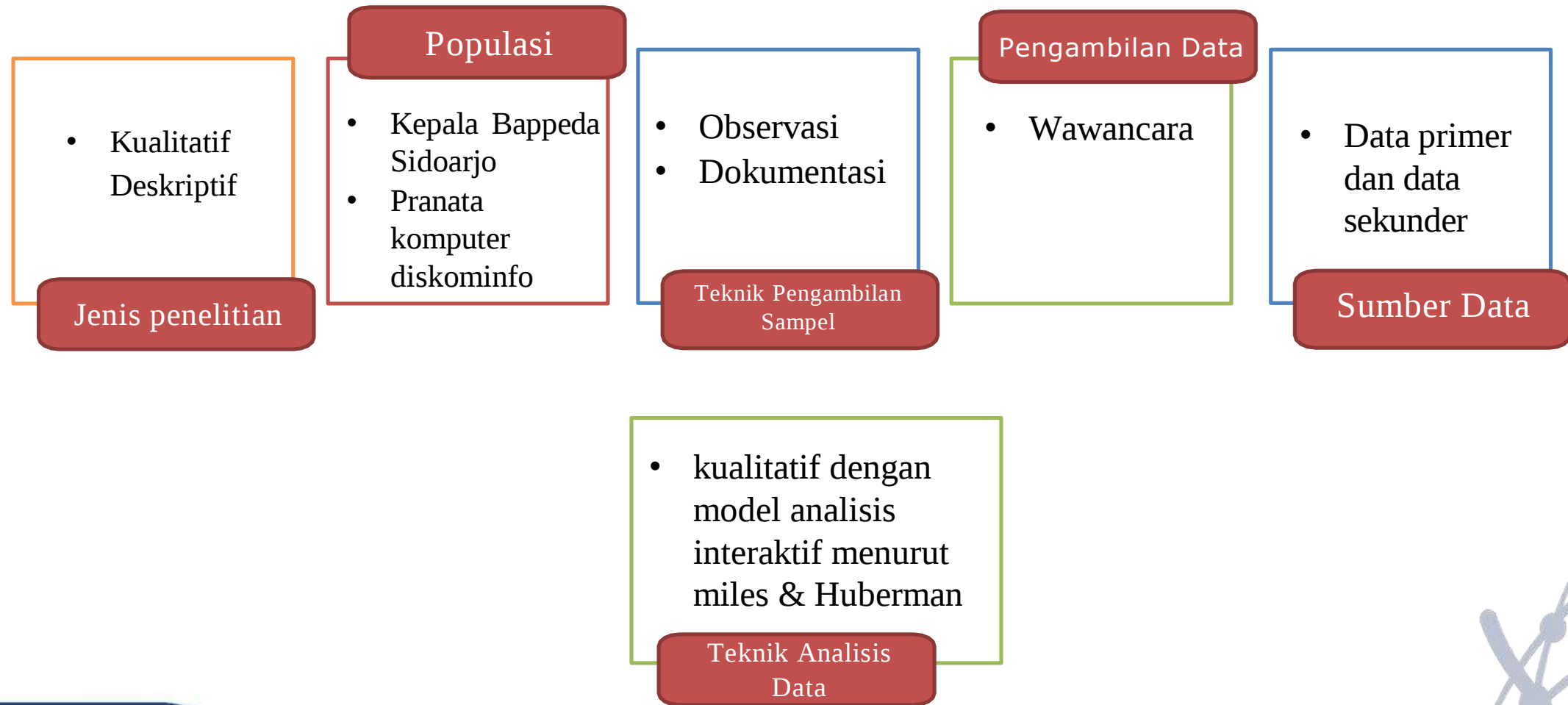
Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana sistem informasi dapat mendukung pembangunan lokal yang berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo
2. Bagaimana peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Sidoarjo menggunakan kerangka Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). Fokus utama adalah mengevaluasi bagaimana faktor-faktor seperti ekspektasi kinerja, kemudahan penggunaan, pengaruh sosial, dan kondisi yang memfasilitasi mempengaruhi penggunaan SIPD dalam mendukung pembangunan lokal yang berkelanjutan dan transparansi fiskal.

Metode Penelitian



Hasil Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD di Kabupaten Sidoarjo telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengelolaan data pembangunan dan transparansi anggaran, meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis yang menghambat optimalisasi sistem. SIPD mempercepat proses kerja administrasi, merapikan data, dan meningkatkan kualitas pelaporan, namun akses publik terhadap informasi masih terbatas. Meskipun SIPD memperbaiki ketertiban administrasi, transparansi fiskal belum sepenuhnya terwujud akibat masalah pada kanal publik yang belum stabil, keterlambatan kesiapan data, dan kendala teknis yang terkait dengan infrastruktur pusat.

Temuan Penting Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa ekspektasi kinerja menjadi faktor utama yang mendorong penggunaan SIPD, dimana aparatur merasa bahwa sistem ini meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan mereka. Namun, kendala terbesar terkait dengan masalah teknis seperti downtime, ketergantungan pada infrastruktur pusat, dan kesiapan data publik yang terlambat. Selain itu, meskipun SIPD didukung oleh pelatihan dasar untuk pegawai, penguasaan fungsi yang lebih kompleks perlu diprioritaskan untuk memastikan efektivitas penggunaan sistem.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat dalam memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan SIPD di sektor publik. Temuan ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk mengatasi kendala teknis, meningkatkan literasi digital, dan memperbaiki kanal informasi publik. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan lokal, serta memperkuat kolaborasi antarinstansi terkait.

Kesimpulan

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Sidoarjo, meskipun telah memperbaiki proses penganggaran dan transparansi fiskal di tingkat internal pemerintah, belum sepenuhnya memberikan transparansi fiskal yang optimal kepada publik. SIPD berpotensi meningkatkan efisiensi administrasi dan akuntabilitas, namun tantangan teknis seperti downtime dan ketergantungan pada infrastruktur pusat masih perlu diatasi. Untuk memaksimalkan dampak positif SIPD, diperlukan perbaikan dalam aksesibilitas informasi publik, stabilitas sistem, serta penguatan kapasitas SDM dalam mengelola sistem ini.

Referensi

- [1] J. J. P. Latupeirissa, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tegal Kertha Denpasar,” *Gov. J. Ilm. Kaji. Polit. Lokal dan Pambang.*, vol. 10, no. 2, pp. 114–119, 2023.
- [2] F. Inayah, H. A. Hikmah, and L. Hasanah, “Pengembangan Potensi Lokal Desa Sebagai Upaya dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Tipar,” *Pedamas (Pengabdian Kpd. Masyarakat)*, vol. 2, no. 2, pp. 799–808, 2023.
- [3] H. Turmudi, “Pembangunan Desa : Pemanfaatan Potensi Desa Berbasis Kearifan lokal di Tawang Sari Kabupaten Boyolali,” *Fundam. J. Ilm. Huk.*, vol. 12, no. 1, pp. 43–61, 2023, doi: 10.34304/jf.v12i1.84.
- [4] T. A. Triono, “Konsep Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal: Hamemayu Hayuning Bawana Di Daerah Istimewa Yogyakarta,” *J. Soc. Bridg.*, vol. 3, no. 1, pp. 27–38, 2025, doi: 10.59012/jsb.v3i1.64.
- [5] A. Kartika and D. Iskandar, “Meneropong Penerapan E-Government Di Kabupaten Sidoarjo,” *Wacana J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit. Interdisiplin*, vol. 8, no. 2, pp. 276–282, 2021.
- [6] Desry J. Louhenapessy, “Analisis Isu Dan Masalah Pembangunan Ekonomi Provinsi Kepulauan,” *Monet. J. Ekon. dan Keuang.*, vol. 1, no. 4, pp. 197–211, 2023, doi: 10.61132/moneter.v1i4.98.
- [7] M. R. Alfari, “Analisis Isu Dan Masalah Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Kudus,” *J. Ekon. Bisnis dan Sos. Sains*, vol. 03, pp. 119–129, 2024.
- [8] Gusnar Ismail, “Implementasi Otonomi Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19,” *J. Lemhannas RI*, vol. 8, no. 3, pp. 190–205, 2022, doi: 10.55960/jlri.v8i3.342.
- [9] S. Yulia and E. Supriatna, “Kontribusi Masyarakat Dalam Menentukan Arah Pembangunan Ekonomi Global Yang Berkelanjutan Di Indonesia,” *Educ. J. Pendidik.*, vol. 2, no. 2, pp. 1–8, 2024.
- [10] P. A. Fauziana, Ardiansyah, “Analisis rendahnya partisipasi masyarakat pada forum musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di desa kenawat kecamatan lut tawar kabupaten aceh tengah,” *J. Ilm. Mhs. FISIP USK*, vol. 09, no. 04, pp. 1–12, 2024.
- [11] S. P. Collins *et al.*, “Efektifitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pendekatan Partisipasi Masyarakat Desa,” vol. 3, no. 3, pp. 167–186, 2021.

Referensi

- [12] I. Setiawan, N. Derenov, B. Arti, and P. Publik, “Hubungan Inovasi Pemerintahan Terhadap Restrukturisasi Pemerintahan Di Indonesia,” vol. 14, no. 2, pp. 234–248, 2024, doi: 10.33701/jiapd.v16i2.4824.
- [13] N. R. Sellfia, U. Dayat, and L. Aryani, “Inovasi pelayanan publik berbasis e-government dalam aplikasi sampurasun Purwakarta,” *Kinerja*, vol. 18, no. 4, pp. 590–598, 2022, doi: 10.30872/jkin.v18i4.10363.
- [14] R. Rame, P. Purwanto, and S. Sudarno, “Industry 5.0 and sustainability: An overview of emerging trends and challenges for a green future,” *Innov. Green Dev.*, vol. 3, no. 4, p. 100173, 2024, doi: 10.1016/j.igd.2024.100173.
- [15] T. Rulandi and J. J. C. Tambotoh, “Analisis Penerimaan Teknologi Pembelajaran Dalam Jaringan Menggunakan Unified Theory of Acceptance And Use of Technology 2,” *J. Sains Komput. Inform. (J-SAKTI)*, vol. 7, no. 1, pp. 126–137, 2023, doi: 10.30645/j-sakti.v7i1.577.
- [16] T. Syeftiani and M. A. Saadah, “Responsivitas Dan Transparansi Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Menangani Keluhan,” *PUBLIKA J. Ilmu Adm. Publik*, vol. 9, no. 1, pp. 99–114, 2023, doi: 10.25299/jiap.2023.vol9(1).12719.
- [17] Nurlaila Nurlaila, Zuriatin Zuriatin, and Nurhasanah Nurhasanah, “Transformasi Digital Pelayanan Publik: Tantangan dan Prospek dalam Implementasi E-Government di Kabupaten Bima,” *Public Serv. Gov. J.*, vol. 5, no. 2, pp. 21–37, 2024, doi: 10.56444/psgj.v5i2.1468.
- [18] D. Alfani and J. Nasution, “Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara,” *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 6, no. 1, pp. 4036–4043, 2022.
- [19] T. Saputra and A. Frinaldi, “Systematic Literature Review Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital,” *Menara Ilmu*, vol. 17, no. 1, pp. 116–124, 2023, doi: 10.31869/mi.v17i1.4534.
- [20] M. Sutalhis and E. Novaria, “Literasi Digital Dan Pelayanan Publik Yang Baik,” *Acad. J. Inov. Ris. Akad.*, vol. 4, no. 1, pp. 17–23, 2024, doi: 10.51878/academia.v4i1.2812.
- [21] H. Suriadi, A. Frinaldi, L. Magriasti, and L. Yandri, “Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia,” *Menara Ilmu*, vol. 18, no. 1, pp. 27–36, 2024, doi: 10.31869/mi.v18i1.4869.
- [22] F. Imansyah *et al.*, “Mendorong Perekonomian Desa: Media Promosi Digital Sebagai Pendorong Penjualan Produk Stick Udang Kelompok Mentari Desa Sungai Kupah,” *J. Abdi Insa.*, vol. 11, no. 3, pp. 2229–2240, 2024, doi: 10.29303/abdiinsani.v11i3.1647.

Referensi

- [23] M. D. Setiyowati and O. Reviandani, “Penerapan Prinsip Utama Good Governance Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di Bappeda Kabupaten Sidoarjo,” *J. Prog. Adm. Publik*, vol. 4, no. 1, pp. 117–125, 2024, doi: 10.37090/jpap.v4i1.1251.
- [24] N. Monica Hidayat, M. Nasrullah, and N. Pudji Istyanto, “Analisis Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology (UTAUT) Terhadap Penerimaan Adopsi Teknologi E-Learning Pada Fitur Video Conference Di Kalangan Mahasiswa Kampus Baru (Studi Kasus: ITTelkom Surabaya),” *J. Technol. Informatics*, vol. 4, no. 1, pp. 18–25, 2022, doi: 10.37802/joti.v4i1.258.
- [25] R. Hardiansyah and T. Jaffisa, “Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik yang Efektif dan Transparan (Studi Kasus Pada Kantor Badan ...,” *Innov. J. Soc. Sci. ...*, vol. 4, pp. 5194–5206, 2024, doi: //doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13709.
- [26] M. D. Wahyuni, I. P. D. Rimbawan, and E. V. Awak, “Implementasi Kebijakan Desentralisasi Dalam Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Daerah Di Indonesia,” *J. Ilm. Cakrawarti*, vol. 7, no. 2, pp. 93–98, 2024, doi: 10.47532/jic.v7i2.1100.
- [27] R. Adawiali, S. Setyawan, A. Triyono, E. P. Saputro, H. Siswanto, and J. Triyanto, “Adopsi Inovasi Program SIMADE (Sistem Informasi Manajemen Desa/Kelurahan) di Desa Papahan Kabupaten Karanganyar,” *J. Keilmuan dan Keislaman*, pp. 106–127, 2022, doi: 10.23917/jkk.v1i3.18.
- [28] S. L. Lumbantobing, H. Kusmanto, and B. Ginting, “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Penerapan E-Planning dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat,” *Perspektif*, vol. 11, no. 4, pp. 1546–1558, 2022, doi: 10.31289/perspektif.v11i4.7227.
- [29] N. Elsha, S. Atikah, and I. P. Lenap, “Pembelajaran Akuntansi Secara Online: Pengujian Model Unified Theory Of Acceptance Dan Use Of Technology (UTAUT),” *Balanc. J. Akunt. dan Manaj.*, vol. 1, no. 3, pp. 292–300, 2022, doi: 10.59086/jam.v1i3.171.
- [30] D. Nur, L. Sifa, L. Dyastari, G. Communications, and D. Samarinda, “Komunikasi Pemerintah dalam Penyebaran Informasi Publik melalui Website pada Diskominfo Kota Samarinda Government Communication in Disseminating Public Information via the Website at Diskominfo Samarinda City,” *J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 12, no. 5, pp. 66–75, 2024.
- [31] H. Alfiani, S. Kurnia Aditya, S. Lusa, D. Indra Sensuse, P. A. Wibowo Putro, and S. Indriasari, “E-Government Issues in Developing Countries Using TOE and UTAUT Frameworks: A Systematic Review,” *Policy Gov. Rev.*, vol. 8, no. 2, p. 169, 2024, doi: 10.30589/pgr.v8i2.932.

Referensi

- [32] Reva Ngulya Savi'ah, Joko Tri Nugraha, Yuni Kurniasih, and Matheus Gratiano Mali, "Analysis Of Use Behavior In The Perspective Of The UTAUT In The Procurement Of Government Goods And Services At The Regional Secretariat Of Magelang City," *J. Info Sains Inform. dan Sains*, vol. 14, no. 02, pp. 118–132, 2024, doi: 10.54209/infosains.v14i02.4377.
- [33] I. Brusca, "No Title," *Implement. Perform. Report. Local Gov. A Cross-Countries Comp.*, 2016, doi: <https://doi.org/10.1080/15309576.2015.1137768>.
- [34] Z. L. and R. S. Edwin Lau, "No Title," *Challenges Meas. Public Sect. Product. OECD Ctries.*, 2014.
- [35] N. F. Kamila and W. Pangestoeti, "Economic Reviews Journal," vol. 4, pp. 235–244, 2025, doi: 10.56709/mrj.v4i1.632.
- [36] I. S. Rubin, *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing*. 2017.
- [37] M. Kardina, A. Frinaldi, and N. E. Putri, "Penilaian Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Di Indonesia," vol. 11, no. 2, pp. 615–620, 2024.

